

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Rumah Belajar

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya yang dimaksudkan dan direncanakan dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat secara aktif meningkatkan potensi mereka untuk memiliki kekuatan agama, spiritualitas, pengendalian diri, kepribadian positif, kecerdasan, perilaku luhur, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk kepentingan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu upaya mendidik adalah melalui pendidikan nonformal. Pembelajarannya tidak dilakukan oleh lembaga pendidikan atau pelatihan dan juga tidak mengarah pada sertifikasi. Tetapi memiliki tujuan belajar.<sup>38</sup>

Berdasarkan pemahaman di atas, harus ada banyak penyelenggara pendidikan nonformal di masyarakat. Salah satunya adalah Rumah Belajar. Rumah belajar adalah suatu tempat untuk belajar bersama yang diajarkan oleh beberapa sukarelawan yang biasanya disebut sebagai guru. Para siswa tidak dikenakan biaya sekolah dan guru tidak mendapat gaji.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Taufiqurrohman., dkk, “*Rumah Belajar : The Societal-Based Management Of Education*”. (Journal of Dedicators Community, Unisnu Jepara, Vol.1, Nomor 2, Juli 2017).

<sup>39</sup> *Ibid.*

Rumah belajar merupakan salah satu model pendidikan alternatif berbasis masyarakat yang berada pada ranah pendidikan nonformal, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan. Keberadaan rumah belajar ini sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (*long life education*). Rumah belajar sebagaimana pendidikan nonformal lainnya berfungsi mengembangkan potensi peserta didik, letak penekanannya ada pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian. Dalam upaya pengembangan potensi peserta didik perlu ditunjang dengan adanya metode dan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan didampingi tutor.<sup>40</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa rumah belajar adalah salah satu pendidikan alternatif untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran yang diciptakan dirumah dan bersifat *fleksibilitas* artinya pembelajaran yang tidak kaku dan terstruktur sebagaimana sekolah formal serta menggunakan model pembelajaran yang menyenangkan dan kreatif.

## **B. Konsep Pendidikan Karakter**

### **1. Pengertian Pendidikan Karakter**

---

<sup>40</sup> Wawan ahmad Ridwan, <https://www.lyceum.id/pendidikan-nonformal-berbasis-masyarakat/>, diakses pada hari Sabtu tanggal 25 November pukul 21.50 WIB.

Pendidikan adalah seluruh aktivitas atau upaya secara sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik terhadap semua aspek perkembangan kepribadian, baik jasmani dan rohani, secara formal, informal, dan nonformal atau berjalan secara terus-menerus untuk mencapai kebahagiaan dan nilai yang tinggi (nilai *insaniyah* maupun *ilahiyah*). Dalam hal ini pendidikan berarti menumbuhkan kepribadian serta menanamkan rasa tanggung jawab sehingga pendidikan terhadap diri manusia adalah bagaikan makanan yang berfungsi memberi kekuatan, kesehatan, dan pertumbuhan untuk mempersiapkan generasi yang menjalankan kehidupan guna memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.<sup>41</sup>

Ki Hajar Dewantara seperti dikutip Abu Ahmadi dan Nur Ukhbiyati dalam bukunya Kurniawan mengemukakan bahwa:

‘pendidikan sebagai tuntutan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka kelak menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya’.<sup>42</sup>

Tujuan pendidikan dalam hal ini agar generasi muda sebagai penerus generasi tua dapat menghayati, memahami, mengamalkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut dengan cara mewariskan segala pengalaman, pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang melatarbelakangi nilai-nilai dan norma-norma hidup dan

---

<sup>41</sup> Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter Konsepsi dan Implementasi secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Perguruan Tinggi dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 27.

<sup>42</sup> *Ibid.*

kehidupan.<sup>43</sup> Dengan demikian, pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi).<sup>44</sup>

Kata karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti:

‘sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain’.<sup>45</sup>

Sedangkan karakter dalam Pusat Bahasa Depdiknas memiliki makna:

‘bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, watak. Adapun makna berkarakter adalah; berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak’.<sup>46</sup>

Koesoema A., sebagaimana dikutip oleh Muslich, menyatakan bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai “ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima

---

<sup>43</sup> Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 67.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>45</sup> Ulil Amri Syafri, *Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 7.

<sup>46</sup> *Ibid.*

dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir”.<sup>47</sup>

Selanjutnya, Imam Ghozali, sebagaimana dikutip oleh Muslich, menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.<sup>48</sup> Akhlak merupakan fondasi dasar sebuah karakter diri. Sehingga pribadi yang berakhlak baik nantinya akan menjadi bagian dari masyarakat yang baik pula. Akhlak dalam Islam juga memiliki nilai yang mutlak karena persepsi antara akhlak baik dan buruk memiliki nilai yang dapat diterapkan pada kondisi apapun, hal ini sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk yang paling mulia.<sup>49</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat At-Tin ayat 4-6:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿١﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٢﴾  
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾ (التين: ٤ - ٦)

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”.<sup>50</sup> (QS At-Tin : 4-6)

<sup>47</sup> Masnur Muslich, *Loc.Cit.*, hlm. 70.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>49</sup> Ulil Amri Syafri, *Loc.Cit.*, hlm. 68.

<sup>50</sup> Muhammad Lutfi, *Terjemah Juz 'amma*, (Jakarta: Grafika Mulia, 2017), hlm. 34.

Pendidikan karakter adalah sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, budi pekerti, moral, watak atau pendidikan etika. Tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari.<sup>51</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur kepada peserta didik serta meningkatkan minat belajar di kalangan masyarakat modern yang mulai tergerus dengan adanya pergeseran budaya yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan perkembangan pola pikir yang baik.

## **2. Urgensi Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter saat ini merupakan topik yang banyak dibicarakan di kalangan pendidik. Pendidikan karakter diyakini sebagai aspek penting dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter masyarakat yang berkualitas turut menentukan kemajuan suatu bangsa perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini, karena usia

---

<sup>51</sup> M. Mahbubi, *Pendidikan Karakter Implementasi Aswaja sebagai Nilai Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 41-42.

dini merupakan masa “emas” namun “kritis” bagi pembentukan karakter seseorang.<sup>52</sup>

Pendidikan karakter menurut Suyanto, dalam bukunya Kurniawan, beliau menyatakan bahwa pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak, atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas (*golden age*), karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian Suyanto menunjukkan bahwa sekitar 50 persen variabelitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30 persen berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20 persen sisanya pada pertengahan dan akhir dasawarsa kedua. Dari sini selanjutnya Suyanto menyimpulkan bahwa pendidikan karakter hendaknya dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak.<sup>53</sup>

Pendidikan karakter menurut Wibowo, dalam bukunya Kurniawan, beliau menyatakan bahwa pendidikan karakter mutlak diperlukan bukan hanya di sekolah saja, melainkan pula di rumah, dan di lingkungan (masyarakat). Begitu pentingnya pendidikan karakter, sampai-sampai beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan China sudah menerapkan model pendidikan

---

<sup>52</sup> Heri Gunawan, *Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi*, (Bandung: alfabeta, 2017), Cet.4, hlm. 28.

<sup>53</sup> Syamsul kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 33.

tersebut sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hasil penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis, berdampak positif pada pencapaian akademis.<sup>54</sup>

Terkait dengan perlunya pendidikan karakter, Lickona mengungkapkan ada sepuluh tanda zaman yang dapat membawa bangsa menuju jurang kehancuran dan harus tetap diwaspadai, yaitu: a) meningkatnya kekerasan di kalangan masyarakat; b) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk (tidak baku); c) pengaruh *peer group* (geng) dalam tindak kekerasan semakin menguat; d) meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas; e) menurunnya etos kerja; f) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; g) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok; h) membudayanya kebohongan atau ketidakjujuran; i) adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah Indonesia kini sangat gencar mensosialisasikan pendidikan karakter. Di Indonesia, pendidikan karakter sebenarnya sudah lama diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah-sekolah, khususnya dalam pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan sebagainya. Namun, implementasi pendidikan karakter masih belum maksimal,

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>55</sup> Gunawan, *Loc.Cit.*, hlm. 28.



dikarenakan pendidikan karakter bukan hanya proses menghafal materi ujian dan teknik-teknik menjawabnya. Pendidikan karakter memerlukan pembiasaan berbuat baik, pembiasaan berlaku jujur, kesatria, malu berbuat curang, malu bersikap malas, malu membiarkan lingkungannya kotor. Karakter tidak terbentuk secara instan, tetapi harus dilatih secara serius dan proporsional agar mencapai bentuk dan kekuatan yang ideal.<sup>56</sup>

### **3. Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter di sekolah akan terlaksana dengan lancar, jika guru dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan karakter. Kemendiknas (2010) memberikan rekomendasi 11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif sebagai berikut:

- a. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter;
- b. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku;
- c. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun karakter;
- d. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian;
- e. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik;

---

<sup>56</sup> Syamsul kurniawan, *Loc.Cit.*, hlm. 38.

- f. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses;
- g. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada peserta didik;
- h. Mengfusikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagai tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama;
- i. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter;
- j. Mengfusikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter;
- k. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik.<sup>57</sup>

Prinsip-prinsip pendidikan karakter menurut Budimasyah, sebagaimana dikutip Gunawan, beliau berpendapat bahwa program pendidikan karakter di sekolah perlu dikembangkan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pendidikan karakter di sekolah harus dilaksanakan secara berkelanjutan (kontinuitas). Hal ini mengandung arti bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan proses yang panjang,

---

<sup>57</sup> Gunawan, *Loc.Cit.*, hlm. 35.

mulai sejak awal peserta didik masuk sekolah hingga mereka lulus sekolah pada suatu satuan pendidikan.

- b. Pendidikan karakter hendaknya dikembangkan melalui semua mata pelajaran (terintegrasi), melalui pengembangan diri, dan budaya suatu satuan pendidikan. Pembinaan karakter bangsa dilakukan dengan mengintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran, dalam kegiatan kulikuler mata pelajaran, sehingga semua mata pelajaran diarahkan pada pengembangan nilai-nilai karakter tersebut. Pengembangan nilai karakter juga dapat dilakukan dengan melalui pengembangan diri, baik melalui konseling maupun kegiatan ekstra kulikuler, seperti kegiatan kepramukaan dan lain sebagainya.
- c. Sejatinya nilai-nilai karakter tidak diajarkan (dalam bentuk ilmu pengetahuan), jika hal tersebut diintegrasikan dalam mata pelajaran. Kecuali bila dalam bentuk mata pelajaran agama (yang di dalamnya mengandung ajaran) maka tetap diajarkan dengan proses, pengetahuan (*knowing*), melakukan (*doing*), dan akhirnya membiasakan (*habit*).
- d. Proses pendidikan dilakukan peserta didik dengan secara aktif (*active learning*) dan menyenangkan (*enjoy full learning*). Proses ini menunjukkan bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Sedangkan guru menerapkan prinsip

“tut wuri handayani” dalam setiap perilaku yang ditunjukkan oleh agama.<sup>58</sup>

#### 4. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi dasar nilai karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu, pendidikan karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.<sup>59</sup>

Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan karakter sebagai berikut.<sup>60</sup>

**Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter**

No	Nilai	Deskripsi
1	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>59</sup> Syamsul kurniawan, *Loc.Cit.*, hlm. 39.

<sup>60</sup> *Ibid.*, 41-42.

		berbeda dengan dirinya.
4	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6	Kreatif	Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8	Demokratis	Cara berfikir, bertindak dan bersikap yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, atau didengar.
10	Semangat Kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas diri dan kelompoknya.
11	Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas diri dan kelompoknya.
12	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.
13	Bersahabat/ Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang

		dan aman atas kehadiran dirinya.
15	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara, dan Tuhan YME.

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, hukum, etika akademik dan prinsip-prinsip HAM telah teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi lima nilai utama yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan YME, diri sendiri, sesama manusia dan lingkungan serta kebangsaan. Adapun nilai-nilai tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

a. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Tuhan

1) Religius

---

<sup>61</sup> M. Mahbubi, *Loc.Cit.*, hlm. 44.

Pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai ketuhanan.<sup>62</sup>

b. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Diri Sendiri

1) Jujur

Jujur sebagai sebuah nilai merupakan keputusan seseorang untuk mengungkapkan perasaan, kata-kata, dan perbuatan bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain untuk keuntungan dirinya.<sup>63</sup>

2) Bertanggung Jawab

Perilaku biasa menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, menghindari sikap ingkar janji dan biasa mengerjakan tugas sampai selesai.<sup>64</sup>

3) Menghargai Kesehatan

Sering bersikap dan bertindak yang dapat meningkatkan kesehatan dan menahan diri dari tindakan yang dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani.<sup>65</sup>

4) Disiplin

Perilaku bila mengerjakan Sesuatu dengan tertib, memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang positif, belajar

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Dharma Kesuma, dkk., *Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 16.

<sup>64</sup> Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 46.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

secara teratur dan selalu mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab.<sup>66</sup>

5) Bekerja Keras

Perilaku sering membantu pekerjaan orang tua di rumah, guru, teman, dan lainnya; berupaya belajar mandiri dan berkelompok; dan biasa mengerjakan tugas-tugas rumah dan sekolah.<sup>67</sup>

6) Rasa Percaya Diri

Perilaku sering bersikap dan berperilaku mantap dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan tidak mudah terpengaruh oleh ucapan atau perbuatan orang lain.<sup>68</sup>

7) Berjiwa Wirausaha

Sikap dan perilaku mandiri serta pandai mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan usahanya.<sup>69</sup>

8) Berpikir Logis, Kritis, Kreatif, dan Inovatif

Berpikir dan melakukan sesuatu secara logis untuk menghasilkan cara baru dari apa yang telah dimiliki.<sup>70</sup>

9) Mandiri

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>69</sup> M. Mahbubi, *Op.Cit.*, hlm. 45.

<sup>70</sup> *Ibid.*



Sikap mampu berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain.<sup>71</sup>

10) Inovatif

Berusaha menemukan atau memperkenalkan sesuatu yang baru.<sup>72</sup>

11) Cinta Ilmu

Mempunyai kegemaran untuk menambah dan memperdalam ilmu.<sup>73</sup>

c. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Sesama

1) Sadar Akan Hak dan Kewajiban Diri dan Orang Lain

Sikap tahu dan mengerti serta merealisasikan apa yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan orang lain serta tugas dan kewajiban diri sendiri serta orang lain.<sup>74</sup>

2) Patuh pada Norma Sosial

Sikap menurut dan taat terhadap aturan yang berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum.<sup>75</sup>

3) Menghargai Karya dan Prestasi Orang Lain

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.<sup>76</sup>

---

<sup>71</sup> Marzuki, *Pendidikan Karakter Islam*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 98.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> M. Mahbubi, *Loc.Cit.*, hlm. 46.

<sup>75</sup> *Ibid.*

4) Demokratis

Cara berfikir, bertindak dan bersikap yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.<sup>77</sup>

5) Santun

Halus dan baik budi bahasa serta tingkah lakunya.<sup>78</sup>

d. Nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Lingkungan

1) Peduli Lingkungan Sekitar

Perilaku senantiasa memelihara dan menjaga lingkungan sekitar dan tidak merusaknya.<sup>79</sup>

e. Nilai Kebangsaan

Cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan individu dan kelompok.

1) Nasionalis

Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, kultur, ekonomi, dan politik bangsanya.<sup>80</sup>

2) Menghargai Keberagaman

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Marzuki, *Loc.Cit.*, hlm. 100.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>80</sup> M. Mahbubi, *Loc.Cit.*, hlm. 48.

Sikap memberikan rasa hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, kultur, suku dan agama.<sup>81</sup>

## **C. Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat**

### **1. Pengertian Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan dari demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”. Pendidikan dari masyarakat artinya pendidikan memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan. Sedangkan pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mereka.<sup>82</sup>

Pendapat lebih luas tentang pendidikan berbasis masyarakat dikemukakan oleh Galbraith, dalam bukunya zubaedi, sebagai berikut:

‘Pendidikan berbasis masyarakat dapat diartikan sebagai proses pendidikan di mana individu-individu atau orang dewasa

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 131-132.

menjadi lebih berkompeten menangani keterampilan, sikap, dan konsep mereka dalam hidup di dalam dan mengontrol aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui partisipasi demokratis'.<sup>83</sup>

Dari sini dapat ditarik pemahaman bahwa pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaan berada di tangan masyarakat dengan tujuan untuk membelajarkan mereka sendiri sehingga lebih berdaya dan memiliki kekuatan untuk membangun dirinya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya.<sup>84</sup>

Model pendidikan berbasis masyarakat untuk konteks Indonesia kini semakin diakui keberadaannya pasca pemberlakuan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan lembaga ini diatur pada 26 ayat 1 s/d 7.<sup>85</sup> Hanya saja UU ini tidak menggunakan istilah pendidikan berbasis masyarakat, tapi pendidikan nonformal.

Lebih lanjut disebutkan, pendidikan nonformal diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*

fungsional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas tempat kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, majlis ta'lim serta satuan pendidikan yang sejenis.<sup>86</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang diciptakan untuk masyarakat itu sendiri dengan mengembangkan potensi yang ada dalam diri agar mampu mengatasi masalah mereka sendiri dan berbagai masalah sosial yang ada dalam masyarakat.

## **2. Prinsip-Prinsip Pendidikan Berbasis Masyarakat**

Pendidikan berbasis masyarakat sebagai program harus berlandaskan pada keyakinan dasar bahwa partisipasi aktif dari warga masyarakat adalah hal yang pokok. Untuk memenuhinya, maka partisipasi warga harus didasari kebebasan atau tanpa tekanan, kemampuan berpartisipasi dan keinginan berpartisipasi.<sup>87</sup>

Beberapa prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat antara lain adalah: 1) mampu beradaptasi (*adaptability*);

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>87</sup> *Ibid.*

2) tumbuh (*growth*); 3) memiliki integritas (*integrity*); dan 4) memanfaatkan potensi lokal (*locality*).<sup>88</sup>

Secara lebih luas Galbraith, sebagaimana dikutip dalam bukunya Zubaedi, menjelaskan bahwa pendidikan berbasis masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Self determination* (menentukan diri)

Semua anggota masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.

2. *Self help* (menolong diri sendiri)

Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena beranggapan bahwa tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri.

3. *Leadership development* (pengembangan kepemimpinan)

Para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses

---

<sup>88</sup> Eroby Jawi Fahmi, “*Pendidikan Berbasis Masyarakat (Studi Tentang Rumah Pengetahuan Amartya Bantul)*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat.

4. *Localization* (Lokalisasi)

Potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.

5. *Integrated delivery of service* (keterpaduan pemberian pelayanan)

Adanya hubungan antaragensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik.

6. *Reduce duplication of service* (mengurangi duplikasi pengurangan)

Masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan mengoordinir usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan.

7. *Accept diversity* (menerima perbedaan)

Menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Termasuk perwakilan warga masyarakat seluas mungkin dituntut dalam pengembangan, perencanaan dan

pelaksanaan program, pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan.

8. *Institutional responsiveness* (tanggung jawab kelembagaan)

Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat.

9. *Lifelong learning* (pembelajaran seumur hidup)

Kesempatan pembelajaran formal dan informal harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk semua umur dalam berbagai jenis latar belakang masyarakat.<sup>89</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip pendidikan berbasis pada masyarakat adalah prinsip pendidikan yang menekankan partisipasi dan inisiatif penuh dari masyarakat. Pendidikan merupakan suatu proses yang membutuhkan bantuan dari semua disiplin ilmu, keahlian dan berbagai hal lainnya: sarana prasarana, infrastruktur, peralatan dan media pembelajaran, sumber daya manusia, keamanan dan kenyamanan lingkungan, pembiayaan, dan lain sebagainya yang terkandung dalam unsur-unsur pendidikan dan prinsip-prinsip pendidikan berbasis masyarakat di atas. Semua pendidikan tersebut baru bisa terlaksana jika mendapat bantuan dari semua pihak.

---

<sup>89</sup> Zubaedi, *Loc.Cit.*, hlm. 137-139.



### 3. Masyarakat sebagai Lembaga Pendidikan

Masyarakat bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan atau norma yang mengatur hubungan satu sama lain. Pola hubungan antar individu dalam masyarakat tersebut pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang diakui bersama dan diabadikan dalam norma dan aturan yang pada umumnya tidak diverbalkan. Dengan demikian, masing-masing individu diharuskan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut sehingga tercipta suatu hubungan sosial yang relatif stabil.<sup>90</sup>

Hubungan masyarakat yang relatif stabil tersebut dilakukan dengan cara individu menginternalisasikan nilai-nilai yang membentuk keteraturan tersebut sehingga tidak terjadi konflik sosial. Individu-individu muda, dalam hal ini anak, dalam proses integrasinya dengan masyarakat akan lambat laun mempelajari dan mengenali pola-pola hubungan yang ada tersebut untuk mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat adalah wadah di mana individu mengalami proses pembelajaran secara langsung.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Abdul Latif, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 33.

<sup>91</sup> *Ibid.*

Di samping entitas masyarakat itu sendiri sebagai tempat pendidikan, masyarakat juga mewadahi apa yang disebut *community school* (sekolah masyarakat).<sup>92</sup>

Timbulnya sekolah masyarakat berangkat dari, *pertama*, kenyataan tidak memadainya sekolah untuk menampung semua anggota masyarakat yang berkeinginan terlibat dalam proses belajar-mengajar dalam lembaga tersebut. *Kedua*, adanya gejala disorientasi lembaga pendidikan dalam konteks sosial. Hal ini dipicu dengan adanya kecenderungan (1) kurikulum sekolah yang kebanyakan berpusat pada mata pelajaran yang tersusun secara logis sistematis yang tidak nyata berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sehingga lebih cenderung menjadi *subject centered curriculum*, kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran atau disiplin ilmu, (2) kurikulum sekolah yang berpusat pada anak, minat, dan perkembangannya sehingga cenderung mengabaikan orientasi sosial dan dianggap memberikan pendidikan individualitas.<sup>93</sup>

#### **4. Pendidikan Karakter Berbasis Masyarakat**

Sebagai lingkungan pendidikan nonformal, masyarakat semestinya juga turut berperan dalam terselenggaranya proses pendidikan karakter. Setiap individu sebagai anggota dari masyarakat tersebut harus bertanggungjawab dalam menciptakan suasana yang

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 34.

nyaman dan mendukung untuk proses perkembangan karakter atau kepribadian anak.<sup>94</sup>

Karena pentingnya peran masyarakat sebagai pusat pendidikan karakter maka setiap individu sebagai anggota masyarakat harus menciptakan suasana yang nyaman demi keberlangsungan proses pendidikan yang terjadi di dalamnya. Di Indonesia, dikenal adanya konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*) sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun konsep ini lebih sering dikaitkan dengan sekolah sebagai pendidikan formal, dengan adanya konsep ini sekaligus menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan, serta keberadaannya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah.<sup>95</sup>

Belakangan ini masyarakat menunjukkan gejala kemerosotan moral yang amat parah. Oleh karena itu, pilihan untuk menjadikan masyarakat sebagai pusat pendidikan karakter di samping keluarga dan sekolah tentulah tepat dan mendesak agar bangsa ini tidak terlalu lama menjadi bangsa yang “sakit” sebelum bertambah parah menjadi “kronis”, yang pada akhirnya membunuh harapan masa depan bangsa. Gejala kemerosotan moral di masyarakat mengindikasikan

---

<sup>94</sup> Syamsul Kurniawan, *op.cit.*, hlm. 49.

<sup>95</sup> *Ibid.*

adanya pergeseran ke arah ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa.<sup>96</sup>

Dalam penyelenggaraan pendidikan karakter, dibutuhkan keterpaduan pusat pendidikan karakter yaitu meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. Semuanya perlu berada dalam suatu kekompakan melalui jalinan komunikasi dan kolaborasi yang harmonis dalam mendukung program-program pendidikan karakter. Jadi masyarakat di sini juga mempunyai tanggung jawab yang sama besar dalam mendidik karakter dan kepribadian anak.

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 194.